

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Rumah Data Kependudukan dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB Oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hasil temuan pada data wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edrward III yang terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas melalui implementasi Rumah Data Kependudukan belum berjalan dengan optimal. Dari 62 Kampung KB yang ada di Kabupaten Sijunjung, hanya 39 Kampung KB yang melakukan perencanaan/intervensi menggunakan data Rumah Dataku.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data yang peneliti jabarkan pada bab dan sub bab sebelumnya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rumah Dataku belum berjalan dengan optimal. Pada variabel komunikasi, pelaksana memahami informasi terkait pelaksanaan Rumah Dataku dengan jelas dan konsistensi pelaksanaan sesuai dengan arahan yang diberikan. Namun konsistensi kegiatan pembinaan oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung tidak dapat dilanjutkan pada tahun 2025 karena keterbatasan anggaran. Kendala juga muncul dalam mentransmisikan pelaksanaan Rumah Dataku kepada pengurus Rumah Dataku. Penyampaian informasi kepada pengurus Rumah Dataku belum dilakukan secara menyeluruh. Hal tersebut berimplikasi pada ketimpangan kapasitas pengurus dalam pengelolaan Rumah Dataku.

Apabila dilihat dari sisi sumber daya manusia, selama pelaksanaan Rumah Dataku belum didukung oleh ketersediaan staff yang memadai. Jumlah tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang masih terbatas mengakibatkan tidak efektifnya pelaksanaan Rumah Dataku karena luasnya wilayah garapan tidak sebanding dengan beban kerja yang diberikan. Ketersediaan fasilitas pendukung dalam pengelolaan Rumah Dataku menjadi faktor penting dalam keberlangsungan program. Pengadaan fasilitas berkaitan ketersediaan anggaran. Dalam pelaksanaan Rumah Dataku di Kabupaten Sijunjung belum terdapat anggaran khusus Rumah Dataku. Dalam buku panduan pengelolaan Rumah Dataku anggaran dapat bersumber dari dana swadaya masyarakat, Anggaran Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun kenyataan di lapangan, pengadaan anggaran lebih dibebankan kepada nagari. Dalam pelaksanaan Rumah Dataku, anggaran pendampingan bersumber dari APBN, namun anggaran tersebut hanya didistribusikan kepada Rumah Dataku yang menjadi sasaran Pro-Pn. Dengan demikian, diketahui pendistribusian anggaran dari APBN belum merata kepada seluruh Rumah Dataku yang ada. Selain itu, pengelolaan Rumah Dataku bersifat konvensional menyebabkan data tidak terintegrasi secara digital sehingga mengakibatkan data sulit diakses oleh OPD pemanfaat data. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat alokasi anggaran yang digunakan untuk pengembangan Rumah Dataku.

Selanjutnya pada variabel disposisi, dalam hal pengangkatan birokrat telah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan sedangkan insentif tidak

mempengaruhi pelaksana untuk melakukan pembinaan Rumah Dataku. Namun, insentif berpengaruh terhadap pengurus Rumah Dataku yang mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data. Tidak adanya stimulan finansial dan hanya mengandalkan kesukarelaan mempengaruhi pengurus dalam melaksanakan kegiatan dan keberlanjutan program.

Terakhir pada variabel struktur birokrasi, meskipun dalam pelaksanaan Rumah Dataku tidak menunjukkan adanya fragmentasi yang dapat mempengaruhi koordinasi. Namun fragmentasi dan koordinasi justru terlihat dalam aspek pemanfaatan data. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Rumah Dataku mempunyai peranan masing-masing. Pengurus Rumah Dataku berkoordinasi dengan nagari dalam mengintervensi masalah kependudukan. Sementara itu koordinasi juga terlihat antara instansi pemanfaat data, dengan adanya koordinasi antar lintas sektor ini, data yang dihasilkan Rumah Dataku dapat dimanfaatkan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Meskipun demikian, keberhasilan koordinasi dalam pemanfaatan data tentu didukung oleh ketersediaan data Rumah Dataku. Namun pada kenyataannya, tidak semua Rumah Dataku yang aktif dalam penyediaan data untuk perencanaan/intervensi masalah kependudukan.

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan implemementasi Rumah Dataku sebagai upaya optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas yang semestinya dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sijunjung agar dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan program. Temuan dari penelitian ini, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi DPPKB

Kabupaten Sijunjung untuk dapat meningkatkan pengelolaan Rumah Dataku dalam mencapai tujuan, seperti dengan peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memadai, penguatan dukungan anggaran dan peningkatan kapabilitas pengurus Rumah Dataku. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi wawasan baru mengenai implementasi Rumah Dataku dari sisi lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Rumah Dataku di tingkat daerah.

Penelitian ini mampu menggambarkan cukup komprehensif mengenai pelaksanaan Rumah Dataku yang dilihat dari sisi lembaga yang bertanggungjawab yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung. Untuk memperluas cakupan kajian penelitian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara numerik untuk melihat pengaruh kualitas Data Rumah Dataku terhadap efektivitas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas.

6.2 Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan dari penelitian mengenai Implementasi Rumah Data Kependudukan dalam Upaya Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas oleh DPPKB Kabupaten Sijunjung yang sebelumnya sudah peneliti jelaskan di atas, maka dari itu peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan untuk menyempurnakan proses implementasi Rumah Dataku ini. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan kapasitas pengurus Rumah Dataku yang dilakukan melalui pembinaan secara teratur dan menyeluruh agar setiap pengurus mempunyai

pemahaman dan kompetensi dalam melakukan kegiatan pada Rumah Dataku.

2. Melakukan penambahan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kabupaten Sijunjung sehingga beban kerja lebih merata.
3. Pemerintah dapat memberikan penguatan dukungan anggaran untuk pengelolaan dan operasional Rumah Dataku, yang mana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus yang berkaitan dengan keberlangsungan Rumah Dataku.
4. Melakukan integrasi data pada seluruh Rumah Dataku secara digital, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemanfaat data lebih efektif.
5. Menyediakan anggaran untuk pemberian insentif agar mendorong pengurus Rumah Dataku dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada secara optimal.

